

MAKNA DAN HAKIKAT PENDIDIKAN BIDANG POLITIK DALAM ALQURAN

Aslan

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Correspondensi author email: aslan@iaisambas.ac.id

ABSTRACT

Education is not only in the social and cultural scope, but covers all fields, including the political field. The study of this research is literature by searching related literature and looking for research findings from this study. The findings of this study that; First, politics teaches us about power, which is obtained by education. Second, the Qur'an also teaches humans about good politics without bringing down opponents.

Keyword: Meaning, Nature of Education, Politics In The Quran

ABSTRAK

Pendidikan bukan hanya dalam ruang lingkup sosial dan budaya, tetapi mencakup pada segala bidang, termasuk bidang politik. Kajian dari penelitian ini adalah literatur dengan mencari literatur yang berkaitan dan mencari temuan penelitian dari kajian ini. Hasil temuan dari penelitian ini bahwa; Pertama, politik mengajarkan kita tentang kekuasaan, yang diperoleh dengan pendidikan. Kedua, al-Qur'an juga mengajarkan manusia tentang cara berpolitik yang baik tanpa menjatuhkan lawan.

Kata Kunci: Makna, Hakikat Pendidikan, Politik dalam Alquran

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia saat ini berada dalam kondisi keterpurukan dan keterbelakangan. (Aslan, 2015; Aslan, 2018; Aslan, 2016). Walaupun pemerintah mencanangkan program wajib belajar Sembilan tahun, tapi masih banyak anak yang belum bisa mengenyam sekolah. Salah satu contoh yang menjadi gambaran mengapa pendidikan di Indonesia masih gagal, yaitu banyaknya pelajar yang terlibat narkoba, seks bebas, aborsi, tawuran antar pelajar dan lainnya merupakan bukti gagalnya sistem pendidikan di Indonesia.

(Aslan, 2018; Aslan, 2016; Aslan & Suhari, 2018; Aslan, 2018; Aslan, 2017; Aslan, 2017; Aslan, 2017; Aslan, 2017).

Pendidikan pada hakikatnya, tidak akan bisa berdiri sendiri namun dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lain, misalnya politik, sosial, ekonomi dan budaya. Pendidikan dipandang sebagai alat politik untuk mengatur dan menguasai perkembangan suatu bangsa, walaupun politik sendiri tidak terlepas dari pengaruh sosial, ekonomi dan budaya. Suatu bangsa akan dipandang sebagai bangsa yang maju dan berkualitas oleh bangsa lainnya apabila penduduk bangsa itu memiliki pendidikan yang mapan dan mempunyai kualitas yang tinggi. (Potret Pendidikan di Indonesia, 2014).

Pendidikan Islam di Indonesia sudah berlangsung sejak masuknya Islam di Indonesia. Agama Islam dating ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, disiarkan secara damai tanpa paksaan, kekerasan atau peperangan. Dalam penyiaran Islam pada tahun-tahun permulaan dilakukan oleh pemuka masyarakat yang dikenal dengan sebutan para wali. Para wali inilah yang berjasa mengembangkan agama Islam, terutama di Pulau Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Kegiatan pendidikan Islam tersebut merupakan pengalaman dan pengetahuan yang penting bagi kelangsungan perkembangan Islam dan umat Islam, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pendidikan Islam itu bahkan menjadi tolak ukur, bagaimana Islam dan umatnya telah memainkan peranannya dalam berbagai aspek sosial, politik dan budaya. (Potret Pendidikan Islam di Indonesia, 2013).

Inti dari pendidikan pada masa awal tersebut adalah ilmu-ilmu keagamaan yang dikonsentrasikan dengan membaca kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya ilmu keagamaan seseorang. (Daulay, 2004). Beda halnya dengan potret pendidikan di Indonesia saat ini, berbeda jauh dengan pendidikan semasa Islam diterapkan sebagai ideology Negara yang berhasil mencetak banyak ilmuwan dan mujtahid dalam berbagai bidang ilmu seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, al-Biruni, al-Khawarizmi dan lain-lain. Bahkan tidak saja kaya dengan ilmu tetapi juga memiliki kepribadian agung yang menghantarkan masyarakatnya pada kepribadian tinggi yang diridhai Allah. Lalu bagaimana pendidikan politik dalam al-Quran?

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini adalah literatur dengan mengumpulkan literatur yang terkait, kemudian di telaah dan dicari temuan dari penelitian sesuai dengan fokus yang dikaji.

PEMBAHASAN

Pendidikan Politik Dalam Alquran

Menurut Pandangan orientalis barat tentang politik alquran dalam Islam adalah:

1. V. Fitzgerald berkata “Islam bukanlah semata agama namun ia juga merupakan sebuah sistem politik. Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam, yang mendakwa diri mereka sebagai kalangan modernis, yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gagasan pemikiran Islam dibangun diatas fundamental bahwa kedua sisi itu paling bergandingan dengan selaras yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. (Walter, 2003; Hertz, 2003).
2. C. A. Nallino berkata “Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan; agama dan Negara. Dan batas-batas wilayah Negara yang ia bangun it uterus terjaga sepanjang hayatnya. (Chomsky, 2003).
3. Schacht berkata “Islam lebih dari sekedar agama, ia juga mencerminkan teori-teori perundangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan Negara secara bersamaan. (Brockers, 2003).
4. R. Strothmann berkata; “Islam adalah suatu fenomena agama dan politik. Kerena pembangunannya adalah seorang Nabi, yang juga seorang politik yang bijaksana atau negarawan. (Kamil, 2002).
5. D. B. Macdonald berkata; “disini (di Madinah) dibangun Negara Islam yang pertama dan diletakkan prinsip-prinsip utama dalam undang-undang Islam. (Madjid, 2002).
6. Sir T. Arnold berkata; “adalah Nabi pada waktu yang sama seorang ketua agama dan ketua Negara. (‘Ashmawi, tth).
7. Gibb berkata; “dengan demikian, jelaslah bahwa Islam bukanlah sekedar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangun masyarakat yang bebas. Ia mempunyai cara tersendiri dalam sistem pemerintahan, perundangan dan institusi. (Azra, 2000).

Politik Islam dalam bahasa arab dikenal dengan siyasah. Oleh sebab itu, didalam buku-buku para ulama dikenal dengan istilah siyasah syar’iyyah. Dalam al Muhith, siyasah berakar kata sasa-yasusu. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasatan* berarti *Qama ‘alaihi wa radlaha wa addabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). Al siyasah juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinya. Secara tersirat dalam pengertian siyasah terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain yaitu;

- a. Tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian
- b. Cara pengendalian menuju tujuan tersebut

Sedangkan secara istilah politik Islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Pengertian siyasah lainnya oleh Ibn A'qil sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah Swt tidak menentukannya. (Djazuli, 2007).

Pandangan politik menurut syara' realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh Negara maupun rakyat. Sehingga definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral. Hanya saja tiap ideology (kapitalisme, sosialisme, dan Islam) punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur system politik mereka. Dari sinilah muncul pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi netral. (tomysmile.wordpress).

Ada beberapa macam pendidikan politik dalam alquran:

Bebas biaya

Sistem pendidikan Islam didasarkan pada kesadaran bahwa setiap muslim wajib menuntut ilmu dan tidak boleh mengabaikannya. Rasulullah Saw bersabda; "menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim". (H. R. Ibnu Adi dan Baihaqi).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt mewajibkan setiap muslim untuk menuntut ilmu yang dibutuhkannya dalam kehidupan. Ilmu dianggap sebagai sesuatu yang harus ada, termasuk kebutuhan primer manusia. Atas dasar ini, Negara wajib menyediakan pendidikan bebas biaya kepada warga negaranya, baik muslim maupun non muslim, agar mereka bisa menjalankan kewajibannya atau memenuhi kebutuhan primer mereka. Negara menyediakan pendidikan bagi seluruh warga negaranya, baik yang fakir miskin maupun yang kaya, secara Cuma-Cuma. Setiap warna Negara berhak memperoleh pendidikan bebas biaya disemua jenjang pendidikan. (Yasin, 2007).

Dibawah ini merupakan bukti-bukti bahwa Negara bertanggung jawab dalam pendidikan warga negaranya:

1. Rasulluah Saw; sebagai kepala Negara Islam di Madinah, telah menetapkan tebusan tawanan perang Badar berupa keharusan mengajar sepuluh anak kaum muslim.
2. Terdapat ijma sahabat tentang pemberian gaji kepada para guru yang dananya diambil dari Baitul Mal (kas Negara).

3. Wadhiah bin Atha menuturkan riwayat; di madinah terdapat tiga orang guru yang mengajar anak-anak. Khalifah Umar memberikan nafkah kepada tiap-tiap mereka lima belas dinar setiap bulan.
4. Para khalifah sepanjang masa Daulah Khilafah Islamiyah juga memberikan pendidikan bebas biaya kepada warga negaranya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab Negara.

Sumber biaya pendidikan sepenuhnya diperoleh dari Negara (Baitul Mal). Terdapat dua sumber pendapatan Baitul Mal yang dapat digunakan membiayai pendidikan yaitu (1) *fai'* dan *kharaj* yang merupakan kepemilikan Negara, seperti *ghanimah*, *khumuus* (seperlima harta rampasan perang), *jizyah*, dan *dharibah* (pajak); (2) kepemilikan umum seperti tambang minyak dan gas, hutan, laut, dan hima (milik umum yang penggunaannya telah dikhususkan). Adapun pendapatan dari zakat tidak dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan karena zakat mempunyai delapan golongan mustahik zakat. (Q.S. 9:60). (Zallum, 2002).

Jika dua sumber pendapatan itu ternyata tidak mencukupi, dan dikhawatirkan akan timbul efek negatif (*dharar*) jika terjadi penundaan pembiayaan, maka Negara wajib mencukupinya dengan segera dengan cara berhutang (*qardh*). Utang ini kemudian dilunasi oleh Negara dengan dana dari *dharibah* (pajak) yang dipungut dari kaum muslim. (Maliki, 2001). Biaya pendidikan dari Baitul Mal secara garis besar dibelanjakan untuk dua kepentingan. Pertama; untuk membayar gaji semua pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan seperti guru, dosen, karyawan dan lain-lain. Kedua, untuk membiayai segala macam sarana dan prasarana pendidikan seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, sarana-sarana penunjang lain yang dibutuhkan (seperti asrama bagi pelajar, klinik kesehatan, kantor dan sarana administrasi dan lain sebagainya. (Al-Jawi, 2007).

Oleh karena itu, Negara harus bersungguh-sungguh berupaya mengelola perekonomian Negara agar memperoleh pendapatan Negara, seperti yang telah dicontohkan Rasulullah Saw, agar bisa memenuhi kebutuhan primer bagi warga negaranya, termasuk pendidikan.

Rakyat bisa saja ikut menyediakan sarana-sarana tersebut sebagai bentuk amal jariyah/wakaf, tetapi mereka tidak mengambil alih tanggung jawab Negara. Tetap saja, khalifahlah yang akan bertanggung jawab dihadapan Allah Swt terhadap terpenuhinya sarana-sarana tersebut.

Melalui wakaf yang disyariatkan, sejarah mencatat banyak orang kaya yang membangun sekolah dan universitas. Hampir di setiap kota besar seperti Damaskus, Baghdad, Kairo, Asfahan, dan lain-lain terdapat lembaga

pendidikan dan perpustakaan yang berasal dari wakaf. Diantara wakaf ini ada yang bersifat khusus yakni untuk kegiatan tertentu atau orang tertentu seperti wakaf untuk ilmuwan hadis, wakaf khusus untuk dokter, wakaf khusus untuk riset obat-obatan, wakaf khusus untuk guru anak-anak, wakaf khusus untuk pendalaman fikih dan ilmu-ilmu alquran. Bahkan wakaf khusus untuk Syaikh Al-Azhar atau fasilitas kendaraannya. Selain itu wakaf juga diberikan dalam bentuk asrama pelajar dan mahasiswa, alat-alat tulis, buku pegangan, termasuk beasiswa dan biaya pendidikan.

Ayat-Ayat al-Quran tentang Politik

a. Hukum dari Allah; kekuasaan dan kedaulatan milik Allah Swt.

An-nisa' ; ayat 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "ini adalah dari sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad). Katakanlah: "semuanya (datang) dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?

b. Ketaatan kepada pemimpin

An-Nuur ayat 48: Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan RasulNya, agar Rasul menghukum (mengadili) diantara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.

c. Musyawarah dan sistem pengambilan keputusan

Al-Imran: ayat 159: maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

d. Keharusan untuk bersatu padu dan larangan berpecah belah

Al-Imran ayat 103: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

e. Keharusan untuk berlaku, bersifat adil dan menunaikan keadilan

An-Nisa' ; ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

f. Keharusan berlaku, bersifat amanah dan menunaikan amanah kepada yang berhak.

Al Baqarah ayat 283: jika kamu dalam perjalanan (dan bermua'malah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

g. Persamaan derajat dan kedudukan sesama muslim

h. Keharusan membela diri dan keluarga

i. Sifat-sifat pemimpin

Al Baqarah ayat 247: Nabi mereka mengatakan kepada mereka; Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu. Mereka menjawab: Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak? Nabi mereka berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. "Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.

j. Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan

k. Melantik pemimpin

l. Tanggung jawab pemimpin

m. Kewajiban menggunakan Hukum Islam. (Ayat-Ayat al-Qur'an).

PENUTUP

Makna dan hakikat pendidikan bidang politik dalam al-Quran tidak terlepas dari nilai-nilai positif yang diajarkan oleh al-Qur'an secara bersangkutan. Kajian dari penelitian ini adalah literatur dengan mencari literatur yang berkaitan dan mencari temuan penelitian dari kajian ini. Hasil temuan dari penelitian ini bahwa; Pertama, politik mengajarkan kita tentang

kekuasaan, yang diperoleh dengan pendidikan. Kedua, al-Qur'an juga mengajarkan manusia tentang cara berpolitik yang baik tanpa menjatuhkan lawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aslan. (2015). PENGEMBANGAN KURIKULUM KE ARAH PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA).
- Aslan. (2017a). Pumping Teacher dalam Tantangan Pendidikan Abad 21. *Muallimuna*, 2(2), 89–100. <http://dx.doi.org/10.31602/muallimuna.v2i2.771>
- Aslan. (2018a). Kajian Kurikulum Fiqih Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Pada Masyarakat Perbatasan. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 115–124.
- Aslan, A. (2016a). Kurikulum Pendidikan Vs Kurikulum Sinetron. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 14(2), 135–148.
- Aslan, A. (2016b). Pengembangan Kurikulum Ditinjau Dari Tingkat Kabupaten Sambas Pada Daerah Tertinggal di madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Timur. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 41-49-41–49.
- Aslan, A. (2017b). Makna Pendidikan Karakter Dalam Strategi Pembelajaran Di Setiap Sendi-Sendi Pendidikan. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 4(2).
- Aslan, A. (2017c). Strategi Pembelajaran Dalam “Go Sport” Kurikulum Pendidikan Karakter. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 10–19.
- Aslan, A. (2017d). PENDIDIKAN REMAJA DALAM KELUARGA DI DESA MERABUAN, KALIMANTAN BARAT (PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM). *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 16(1), 122–135. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v16i1.1158>
- Aslan, A. (2018b). MAKNA KURIKULUM TERHADAP TEORI TENTANG BELAJAR PADA PERUBAHAN PERILAKU ANAK DIDIK. *Cross-Border : Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi Dan Hubungan Internasional*, 1(2), 56–65.
- Aslan, A. (2018c). PEMBELAJARAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM DI MADRASAH IBTIDAIYAH. *Cross-Border : Jurnal Kajian Perbatasan Antarnegara, Diplomasi Dan Hubungan Internasional*, 1(1), 76–94.
- Aslan & Suhari. (2018). *Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam*. Razka Pustaka.
- Djazuli, Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Rambu-rambu Syariah, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Abd. Mu'in Salim, Fiqih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Jawi MS. *Pembiayaan Pendidikan dalam Islam*. Al-Wa'e. 2007.
- Azyumardi Azra, *Islam Substantif*. (Bandung: Mizan, 2000).